

BAB IV

LANDASAN PEMIKIRAN DIBALIK GAGASAN ALBA DAN PENERAPAN ALBA

1. Landasan Pemikiran Dibalik Gagasan ALBA

Untuk mengidentifikasi landasan pemikiran dibalik gagasan ALBA dengan memakai perspektif dalam ekonomi-politik internasional tesis ini mencoba mendekati ALBA dengan perspektif Marx-Strukturalis. Penulis tidak menggunakan perspektif (neo)liberal karena Hugo Chavez sebagai pendorong ALBA adalah pengkritik terhadap perspektif tersebut. Dari pemikiran Marxis sendiri saat ini memang telah banyak mengalami interpretasi-interpretasi yang berbeda dari kaum yang menamakan diri sebagai Marxist. Perbedaan tersebut terdapat pada beberapa aspek. Namun tesis ini hanya mengambil asumsi dasar dan rekomendasi kebijakan yang tidak banyak dipertentangkan oleh para Marxist sendiri.

Selain dengan analisis diatas yang mengambil pikiran-pikiran Presiden Chavez penulisan tesis ini juga menggunakan *Joint Agreement* dan *Agreement for the Application of ALBA* yang dilakukan oleh Presiden Chavez dan Presiden Castro serta Presiden Morales. Kedua dokumen kesepakatan tersebut diambil karena keduanya dapat dijadikan representasi dari konsep dan penerapan ALBA itu sendiri. Oleh karena itu, dalam analisis berikutnya kedua pendekatan diatas akan digunakan secara bersamaan untuk mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya.

Agar lebih jelas dalam memetakan landasan pemikiran dibalik ALBA ini, tesis ini membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertama; pada sisi asumsi dasar, dan yang kedua; pada sisi rekomendasi kebijakan.

1.1a. Sisi Asumsi Dasar

Dalam tradisi pemikiran Marx, pasar dianggap sebagai media untuk melakukan eksploitasi negara berkembang oleh negara maju. Marx menganggap bahwa negara yang melakukan liberalisasi pada pasarnya hanya akan memberikan keuntungan bagi negara-negara maju yang memang ingin mencari pasar diluar negaranya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kebijakan liberalisasi oleh negara berkembang berarti bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam negerinya yang mengikutkan aktor ekonomi dari negara maju lepas dari aturan-aturan yang melindungi warga negaranya, lingkungan. Dengan kemampuan yang lebih yang dimiliki oleh aktor ekonomi dari negara maju tersebut, dapat dipastikan bahwa merekalah yang akan keluar sebagai pemenang dan kekalahan ada pada pihak pemain lokal. Ini jelas merupakan kerugian bagi negara-negara berkembang.

Akibatnya adalah para aktor ekonomi dari luar tersebut akan dengan lebih leluasa melakukan eksploitasi pasar semata-mata untuk keuntungan bagi pihak mereka. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan semakin lebarnya jurang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Bahkan banyak ilmuan menyimpulkan bahwa negara maju akan terus mengalami kemajuan yang pesat sementara negara berkembang akan terus mengalami degradasi. Kesimpulan ini setidaknya mendapatkan dukungan dengan data bahwa dari 100 pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia, 51 adalah korporasi dan 49 merupakan negara.¹⁰³ Ke 51 korporasi yang pun hampir seluruhnya berbasis dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Sebagai dampak dari kondisi seperti ini adanya penjajahan pada hampir semua bidang kehidupan oleh korporasi.

¹⁰³ Hira Jantani, *Kuasa Korporasi: Penjajahan Pikuan dan Ruang Hidup*, Jurnal Wacana INSISI

Pada kenyataannya di Amerika Latin, kebijakan neoliberal yang membuka pasar seluas-luasnya bagi dunia global ternyata menjadi satu mekanisme pemiskinan. Mekanisme kerjasama yang ada di Amerika Latin yang dibawa oleh FTAA pada dasarnya adalah kerjasama yang membawa bencana bagi masyarakat kelas bawah di Amerika Latin. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa FTAA esensinya adalah satu bentuk ekspansi dari NAFTA yang ternyata telah gagal dalam memberikan kemakmuran bagi masyarakat Amerika Serikat sendiri dan bagi Mexico. FTAA sebagai kerangka kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Latin tidak lain hanyalah jalan untuk membuka pasar mereka bagi kepentingan akumulasi modal kekuatan ekonomi negara-negara maju melalui korporasinya.

Pada Juli 1996 Presiden Rafael Caldera mengegosiasikan persetujuan penyesuaian persetujuan struktural dengan IMF yang mengakibatkan diterimanya kembali program-program neoliberal. Akibatnya adalah terjadinya inflasi sebesar 103% (pada tahun 1996) dan meningkatnya utang luar negeri sebesar \$ 26.5 miliar. Kebijakan pasar bebas juga mengundang modal dan perusahaan-perusahaan asing untuk mengeksploitasi aset-aset perekonomian dan kekayaan alam Venezuela. Minyak sebagai aset utama menggerakkan 80% dari ekspor negara, menyumbangkan separuh dari pendapatan negara dan menanggung sepertiga dari jumlah GDP.¹⁰⁴ Pasar bebas membuka Venezuela bagi produk-produk asing, terutama dari AS yang membuat rakyat tergantung pada produk-produk tersebut dan kemampuan produktif untuk menciptakan produksi non-minyak dalam negeri menjadi rendah.

Sementara itu pada dalam kesepakatan untuk implementasi ALBA pasal 2 disebutkan bahwa

¹⁰⁴ "Venezuela's Oil Based Economy". Council on Foreign Relation, dalam Nurani Soyomukti (Op cit

"the countries shall elaborate a strategic plan in order to guarantee complementary products that can be mutually beneficial based on the rational exploitation of the countries' existing assets, the preservation of resources, the expansion of employment market access and other aspects inspired in the true solidarity fostered by our peoples"

Pasal diatas sebenarnya merupakan jawaban terhadap asumsi yang disebutkan dalam pemikiran Marx-Strukturalis. Oleh karena itulah ALBA ingin menerapkan satu kerjasama regional yang tidak berdasarkan pada eksploitasi untuk kepentingan negara maju semata dan pada saat yang sama memberikan kehancuran bagi ekonomi negara-negara di kawasan Amerika Latin.

Asumsi dasar Marxis-Strukturalis juga mengatakan bahwa dengan model ekonomi neoliberal maka kaum buruh akan dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi korporasi. Hal ini terjadi karena privelege yang diberikan kepada kaum pemodal melalui liberalisasi dan deregulasi sehingga kaum pemodal dapat dengan mudah mengontrol kegiatan ekonomi yang eksploitatif tanpa bisa dikendalikan oleh negara maupun oleh kaum buruh itu sendiri. Disisi lain kaum buruh, yang notabene tidak memiliki alat produksi, tidak memiliki pilihan lain selain bekerja bagi para pemodal karena balutan kemiskinan, meskipun mereka harus bekerja dengan gaji yang sesungguhnya tidak mencukupi bahkan untuk kebutuhan dasar sehari-hari.

Buruh di negara berkembang yang bekerja pada korporasi-korporasi dari negara-negara maju cenderung lebih mudah untuk dieksploitasi karena korporasi-korporasi asing tersebut menggunakan argumentasi bahwa jika buruh di negara berkembang tidak bekerja sesuai dengan yang disyaratkan oleh korporasi tersebut maka korporasi tersebut akan menarik investasinya sehingga kaum buruh akan menjadi miskin. Untuk itu ALBA menekankan perlunya satu kerjasama antara negara-negara berkembang yang dilandaskan pada solidaritas untuk membangun secara bersama-sama demi kepentingan buruh dan

masyarakat secara umum. Hal ini diletakkan pada Article 3 dalam Agreement for the application of ALBA:

"the countries shall exchange comprehensive technology packages developed in their respective nations by the parties, in areas of common interest, which shall be provided for their use and implementation, based on the principles of mutual benefit"

Tradisi pemikiran Marxis mengatakan bahwa perdagangan bebas sejatinya adalah ideologi negara-negara yang telah lebih dulu menjadi kekuatan hegemonik. Negara-negara maju yang telah mencapai satu kemajuan ekonomi yang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi dunia akan memiliki kecenderungan untuk mendorong implementasi kebijakan perdagangan yang bebas kepada negara berkembang karena dengan adanya perdagangan bebas maka negara-negara maju tersebut akan dengan leluasa masuk ke pasar negara berkembang. Ini dilakukan oleh negara maju karena mereka secara pasti akan dapat memenangkan persaingan dengan para aktor ekonomi di negara berkembang karena memiliki kekuatan baik secara ekonomi maupun secara politik. Secara ekonomi, aktor-aktor ekonomi, dalam hal ini korporasi yang berbasis di negara-negara maju, memiliki kemampuan modal yang lebih dari cukup untuk membiayai aktivitas ekonominya sehingga para pemain lokal di negara berkembang tidak akan pernah mampu untuk memenangkan persaingan. Sementara itu, negara-negara maju tidak secara otomatis membuka dengan bebas pasarnya.

Hal ini dapat dilakukan oleh negara-negara maju terutama karena mereka memiliki kekuatan secara politik yaitu dengan melakukan tekanan melalui lembaga perdagangan dunia (WTO) dengan dalih melindungi kepentingan pelaku ekonomi lokalnya. Oleh karena itu negara-negara maju menerapkan standar ganda yaitu mencesak negara berkembang untuk membuka pasarnya dengan

dalih perdagangan bebas, tetapi pada saat yang sama tidak bersedia untuk membuka pasarnya.

Bagi ALBA perdagangan bebas bukanlah sesuatu hal yang buruk, melainkan jika didasari oleh solidaritas, saling menghargai serta berimbang maka perdagangan bebas itu sendiri akan memberikan manfaat yang baik bagi negara-negara yang terlibat didalamnya. Ini dapat terlihat jelas pada pasal-pasal pada Joint Agreement yang ditanda tangani oleh Presiden Chavez dan Presiden Castro pada tanggal 14 Desember 2004 di Havana. Pada pasal 12 terdapat pernyataan dari pihak Kuba untuk menghilangkan hambatan baik hambatan tarif dan non-tarif pada semua barang yang dibuat oleh Venezuela untuk diekspor ke Kuba. Pada sektor investasi, kedua negara sepakat untuk tidak menerapkan pajak keuntungan pada investasi yang dilakukan oleh salah satu pihak di teritori pihak lainnya.

Pada titik ini dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan asumsi pada pemikiran Marxis-Strukturalis dengan ALBA yaitu bahwa perdagangan bebas yang didorong oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang adalah tidak didasarkan pada semangat menghormati kedaulatan negara-negara berkembang tapi semata-mata dilandaskan pada kepentingan sepihak negara-negara maju. Untuk itulah mengapa ALBA didorong sebagai satu bentuk kerjasama perdagangan bebas yang salah satu tujuannya adalah menghalangi negara-negara maju melakukan eskploitasi terhadap negara-negara di kawasan Amerika Latin.

Tradisi Marxis-Strukturalis mengasumsikan bahwa kaum proletarial akan menghancurkan kaum borjuis untuk mengambil alih kekuasaan. Kaum borjuis harus dihancurkan dan dihilangkan dari muka bumi agar kaum proletar dapat berkuasa dan menciptakan satu sistem sosialis yang lebih baik. Asumsi ini sangat diyakini oleh kaum Marxis sebagai satu hal yang tidak dapat dihindari dan

secara pasti akan terjadi. Pada titik ini memang terjadi perdebatan antara para teoritikus mengenai keberlakuan asumsi tersebut. Namun satu hal yang pasti bahwa para penganut pemikirin Marx sangat meyakini itu. Tesis ini hanya mengambil sisi yang disebutkan terakhir dan tidak bermaksud untuk melibatkan diri dalam perdebatan mengenai keabsahan dari asumsi tersebut. Tesis ini ingin menggunakan asumsi tersebut dan melihat relevansinya pada gagasan ALBA.

Pada sisi asumsi diatas dapat dilihat pada bagaimana pikiran-pikiran Hugo Chavez. Pada satu kesempatan setelah melakukan acara berbicara pada televisi milik pemerintah Chavez mengatakan bahwa:

*"We need to improve our strategy in regards to alliances. We cannot allow ourselves to be dragged along by extremist currents ... No! We have to seek out alliances with the middle classes, even with the national bourgeois."*¹⁰⁵

Artinya bahwa terdapat perbedaan yang cukup berarti dimana asumsi Marx yang mengatakan bahwa kaum proletariat harus menghancurkan kaum borjuis namun Hugo Chavez sendiri mengatakan bahwa kita, dalam hal ini termasuk kaum proletariat, harus membangun aliansi dengan kelas menengah dan, bahkan, kelas borjuis alih-alih menghancurkannya. Dari sini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Chavez tidak memakai asumsi yang dipercayai oleh Marxis tetapi melakukan pengembangan terhadap asumsi tersebut sesuai dengan apa yang diyakininya.

Investasi asing yang berasal dari negara-negara maju bagi negara berkembang hanya akan mengakibatkan terjadinya *capital flight*. Capital flight berarti bahwa keuntungan dari kegiatan ekonomi yang berlangsung disatu negara seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh negara tersebut namun

¹⁰⁵ Federico Fuentes, *Venezuela's Chavez: Socialism Still Our Goal*, Green Left Weekly January 21st 2008. <http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3089>, 14 mei 2008 pukul 16.40

adanya investasi asing tersebut membuat keuntungan dari investasi tersebut akan didapatkan oleh investor asing. Akibatnya, negara berkembang yang menerima investasi asing tersebut menjadi semakin lemah karena tidak hanya potensi modalnya yang diambil tetapi juga modal yang ada didapatkan oleh para pemodal asing. Investasi asing yang esensinya adalah utang luar negeri secara otomatis akan memberatkan anggaran satu negara. Kasus utang luar negeri yang dialami oleh Indonesia dapat dijadikan sebagai contoh. Dalam anggaran belanja negara tahun 2005 pembayaran utang adalah anggaran belanja terbesar yaitu sekitar 25% dari total belanja negara.¹⁰⁶ Besarnya pengeluaran negara untuk membayar utang inilah harus dibayar dengan rendahnya anggaran untuk pelayan sosial bagi masyarakat. Rendahnya pelayan sosial dasar tersebut secara otomatis akan menurunkan kesejahteraan hidup masyarakat dan disaat yang sama, kaum pemodal asing menikmati satu keuntungan yang besar.

Untuk itu ALBA seperti yang dinyatakan dalam penekanan terhadap pasal-pasal kesepakatan antara Cuba dan Venezeula disebutkan bahwa:

"the countries will produce a strategic plan to guarantee the most beneficial productive complementation on the bases of rationality, exploiting existing advantages on one side or the other, saving resources, extending useful employment, access to market or any other consideration sustained in genuine solidarity that will promote the strengthes of the two countries"

Negara berkembang diyakini oleh kaum marxis akan mengalami kerugian jika melibatkan diri dalam sistem perdagangan internasional dimana sistem tersebut dikontrol oleh negara-negara maju. Dengan kontrol tersebut, yang ditopang oleh kekuatan ekonomi-politiknnya, negara-negara berkembang akan terdorong untuk memproduksi barang-barang yang tidak memiliki nilai jual yang tinggi dibanding barang-barang yang diproduksi oleh negara-negara maju.

¹⁰⁶ Kusfiardi, *RAPBN Melanggar Hak Konstitusi Rakyat*, Artikel, dipresentasikan pada diskusi "Utang dan Anggaran Pendidikan 20%" di Sekrelanai Koalisi Anti Utang, Jakarta, Mei 2006

Negara berkembang secara terpaksa berfokus pada produksi barang-barang yang nilai jualnya terus menurun, dan barang yang diproduksi oleh negara maju mengalami kenaikan harga secara terus menerus. Kondisi nilai tukar yang tidak seimbang ini diyakini sebagai akibat yang disengaja oleh kontrol yang berada ditangan negara-negara maju. Sebagai contoh, negara berkembang lebih banyak terfokus pada hasil pertanian, sekalipun harga hasil pertanian tersebut mengalami penurunan, maka tidak serta merta demand atas hasil pertanian tersebut menjadi naik. Berbeda dengan apa yang terjadi dengan barang produksi negara maju yang berfokus pada industri maju seperti teknologi informasi. Dapat dipastikan bahwa jika harga satu barang industri negara maju, misalnya telepon seluler, mengalami penurunan harga, maka akan terjadi peningkatan dalam jumlah penjualan.

Untuk itu negara-negara Amerika Latin melalui kerjasama ALBA menghendaki adanya satu industri yang memproduksi barang-barang manufaktur yang bisa memberikan manfaat tidak saja secara ekonomi tetapi memproduksi barang yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Dalam kerjasama tersebut juga disepakati bahwa akan negara-negara anggota harus menerapkan kebijakan tarif yang tetap atau *fixed price*.

Untuk lebih menyederhakan penjelasan mengenai identifikasi landasan pemikiran pada ALBA diatas dapat dilihat pada tabel matriks berikut ini:

Tabel I Matriks Sisi Asumsi Dasar

Marxis-Strukturalis	ALBA
Pasar sebagai eksploitasi negara berkembang oleh negara maju	Pasal II Agreement for the application of ALBA menyebutkan bahwa kerjasama antara negara berkembang adalah upaya membendung adanya eksploitasi oleh negara maju terhadap negara berkembang
Neoliberal: eksploitasi kaum buruh oleh korporasi negara-negara maju	Kerjasama yang berlandaskan pada keuntungan bersama (Pasal III agreement for the Application of ALBA)
Perdagangan bebas adalah ideologi negara-negara yang lebih dulu menjadi hegemonik	Perdagangan bebas sesama negara-negara berkembang
Penghancuran kaum borjuis oleh proletariat	Membangun aliansi dengan kelas menengah maupun juga dengan kelas borjuis
Investasi asing mengakibatkan <i>capital flight</i>	Kerjasama ALBA secara regional akan menghindari terjadinya eksploitasi (Final Declaration from the first Cuba-Venezuela Meeting for ALBA)
Kerugian negara berkembang jika melibatkan diri dalam sistem perdagangan internasional	

1.1.b. Sisi Rekomendasi Kebijakan

Pada sisi kebijakan ini akan digambarkan mengenai bagaimana rekomendasi kebijakan aliran pemikiran Marx-Strukturalis dan disandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada gagasan ALBA.

Dalam pemikiran Marxis, usaha kaum proletariat agar terbebas dari eksploitasi kaum borjuis adalah dengan upaya penyadaran kelas bagi berlangsungnya revolusi sosial. Revolusi sosial ini bertujuan untuk menghasilkan satu distribusi yang merata dalam hal kepemilikan alat produksi. Disini

kekuasaan yang didapatkan pasca revolusi akan diberikan kepada negara. Negara yang telah dikuasai oleh diktator proletariat harus mengontrol ekonomi dan politik. Chavez segera setelah terpilih menjadi presiden melakukan amandemen atas konstitusi. Dalam melakukan ini, Chavez melakukan penyadaran kepada masyarakatnya tentang pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara dan bahwa konstitusi tersebut seharusnya lahir dari aspirasi rakyat. Konstitusi pada pemerintahan sebelum Chavez dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan kekuasaan berjalan atas keinginan-keinginan pemerintah tanpa menghiraukan kepentingan publiknya. Kepemimpinan Chavez mengembalikan esensi dari konstitusi tersebut sebagai hak atas kedaulatan, mendorong semangat sosial yang tinggi menggantikan semangat individualisme.

ALBA sebagai satu kerjasama ekonomi politik regional memang mendorong satu perdagangan bebas diantara negara-negara anggotanya, tetapi disini peran negara, sebagai representasi rakyat yang sesungguhnya, tetap memegang kontrol untuk mengatur. Hal ini berbeda dengan perdagangan bebas versi neoliberal yang menghendaki peran negara yang minim dalam aktivitas ekonomi dan memberikan peran yang lebih besar pada para pelaku pasar. Hal ini sangat jelas terlihat pada setiap kesepakatan yang dilakukan dalam kerangka ALBA dimana peran negara sangat kuat dan menjadi pengatur dari aktor-aktor ekonomi. Contoh yang dapat diangkat adalah kebijakan penetapan tarif yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kerangka kerjasama ALBA juga terlihat jelas adanya kesamaan dengan rekomendasi kebijakan dalam pemikiran Marxis-Strukturalis yaitu bahwa bagi negara-negara berkembang syarat yang harus dimiliki adalah negara aktif dan kuat, menerapkan kebijakan proteksionis dan kebijakan substitusi impor. Dalam kesepakatan ALBA, negara-negara anggota melakukan kerjasama produksi barang yang didasarkan pada semangat saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Seperti yang tercermin dalam rencana Chavez yang ingin

melakukan kerjasama dengan Kolombia agar Kolombia tidak lagi membeli aluminiumnya dari Eropa.¹⁰⁷ Kebijakan substitusi impor ini jika dilihat dalam kerangka kerjasama ALBA adalah satu upaya untuk mengurangi impor barang dari negara-negara maju, dan mengupayakan impor tersebut dari negara-negara anggota ALBA sebagai gantinya.

Akhirnya ALBA diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Dalam pengertian ini adalah bahwa permasalahan yang dihadapi oleh satu negara anggota ALBA adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh negara anggota lainnya. Chavez mengatakan:¹⁰⁸

"kami akan bergabung dengan pandangan untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama yang kami hadapi. Dengan bersama-sama kita dapat menyelesaikan persoalan lebih banyak daripada kita berjuang sendiri-sendiri. Sebagai contoh, Argentina yang telah mengikuti pola neoliberal, pada saat mengalami krisis tidak terlalu diperhatikan oleh lembaga internasional dibanding dengan negara lain. Seharusnya kita secara bersama bisa membantu Argentina. ALBA seharusnya menjadi konvensi; jika menyerang salah satu dari kita berarti menyerang kita semua"

Chavez sebagai Venezuela melawan imperialisme kapitalisme yang ada pada proyek-proyek AS, maka Chavez dipandang sebagai seorang Marxis. Chavez sangat mengerti bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup manusiawi adalah landasan ekonomi yang mencukupi dan kondisi material yang konklusif bagi perkembangannya. Penindasan ekonomi tidak hanya menyebabkan manusia mengalami perkembangan fisik, mental dan kognitif yang

¹⁰⁷ *Memahami Revolusi Venezuela: Perbincangan Hugo Chavez dengan Marta Harnecker*. Monthly Review Press, 2005, Aliansi Muda Progresif dan IGJ, 2006,

¹⁰⁸ *ibid* hal. 136-137

memburuk, melainkan juga melahirkan perlawanan terhadap sistem yang ada karena tidak sesuai dengan tujuan hidupnya.¹⁰⁹

Jalan sosialisme yang ingin ditempuh Chavez dimaksudkan untuk mengatasi adanya pertentangan antara dua kelas, digantikan dengan hubungan kesetaraan melalui penggunaan kekayaan alam dan minyak yang dikontrol oleh negara, yang sebelumnya dikontrol oleh kapitalis, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan ekonomi rakyatnya.

Bagi Marx, pembebasan bagi kelas buruh yang tertindas oleh para kapitalis harus dilakukan oleh kelas tertindas itu sendiri. Munculnya demokrasi partisipatoris di Venezuela juga berdasar pada prinsip yang sama sebagaimana dikatakan Chavez bahwa: "jika kamu ingin memberantas kemiskinan, kamu harus memberikan kekuasaan pada rakyat miskin."

Marxisme adalah ideologi revolusi sosialis, dimaksudkan sebagai solusi terhadap kesalahan kapitalis dengan menggantikan sistem kepemilikan pribadi terhadap kekayaan/sumber-sumber ekonomi dan alat-alat produksi menuju ke sistem kepemilikan kolektif. Marxisme menegaskan bahwa rakyat kelas pekerja perlu untuk merebut kekuasaan politik dari tangan para pemilik modal dan menciptakan negara baru yang secara langsung diarahkan untuk menggunakannya demi kepentingan sosialisme. Hal ini sangat relevan dengan apa yang sering diucapkan oleh Chavez bahwa usahanya adalah menerapkan Sosialisme Baru Abad 21 di Amerika Latin. Disini Chavez menegaskan bahwa sosialisme baru abad 21 harus merupakan sosialisme yang demokratis dan humanis. Penekanan tentang sosialisme baru tersebut dimaksudkan untuk membedakannya dengan sosialisme yang pernah ada di negara-negara lain seperti Uni Soviet dan negara lainnya. Chavez sendiri memandang Marxisme dengan mengalakan:

¹⁰⁹ Nurani Soyomukti, *op cit.* hal 69

"saya tidak percaya pada postulat dogmatis dari Revolusi Marxis. Saya tidak menerima bahwa kita sedang berada pada era revolusi proletariat. Semua itu harus direvisi. Realitas mengatakan hal itu pada kita setiap hari. Apakah tujuan kita di Venezuela sekarang ini untuk menghapuskan kepemilikan pribadi atau suatu masyarakat tanpa kelas? Saya kira tidak.... saya tidak akan menerima bahwa tidak ada pembagian kembali yang adil dalam masyarakat. Kelas atas di negeri kita bahkan tidak mau membayar pajak. Itulah alasan mereka membenci saya. Saya katakan "kamu harus membayar pajak". Saya meyakini lebih baik mati dalam pertempuran... mencobalah dan buatlah revolusi, pergilah bertempur, gapailah sedikit-demi sedikit, daripada memimpikan utopia"¹¹⁰

Disini Chavez menekankan bahwa dirinya dalam praktik-praktik politiknya lebih banyak bertindak atas nama rakyat miskin. Memotivasi rakyatnya yang miskin dengan menenankan pentingnya kerja dalam kehidupan dan pada sisi lain Chavez sebagai pemimpin akan memberikan bantuan dengan jalan kebijakan atau aturan yang lebih memudahkan mereka.

Penyederhanaan dari penjelasan mengenai sisi rekomendasi kebijakan diatas dapat dilihat pada tabel matriks berikut ini:

¹¹⁰ Hugo Chavez on Marxism, dalam <http://indymedia.org.uk/en/2004/08/296440.html>

Tabel II Matriks Sisi Rekomendasi kebijakan

Marxis-Strukturalis	ALBA
Upaya penyadaran kelas bagi berlangsungnya revolusi sosial	Pemahaman rakyat atas konstitusi, kebijakan negara dan solidaritas regional
Peran negara yang besar dalam mengatur ekonomi politik terutama bagi negara berkembang	Kerjasama antara pemerintah negara-negara anggota dengan menjadikan dokumen kesepakatan sebagai dasar/pegangan
Kebijakan substitusi impor	penekanan pada kerjasama antara negara-negara Amerika Latin sebagai alternatif kebijakan impor dari negara-negara maju
Menciptakan pasar bersama oleh negara-negara berkembang	Akses pasar yang lebih besar bagi negara-negara dalam kerangka kerjasama ALBA

1.2. Penerapan ALBA

Pada tahun 1998 berhasil terpilih sebagai presiden melalui pemilu yang demokratis, Chavez menyebut rezim yang dipimpinnya adalah rezim Bolivarian. Konsep kerjasama ALBA pada dasarnya adalah konsep yang didominasi oleh pikiran-pikiran dan cita-cita ideal dari Hugo Chavez tentang negaranya dan hubungan antara negara-negara di kawasan Amerika Latin. Hal ini dapat dilihat pada konsep ALBA tersebut pada awalnya diperkenalkan dan kemudian coba untuk diwujudkan oleh Chavez dengan menawarkan kerjasama kepada para kepala negara di Amerika Latin dengan ikut menjadi anggota ALBA. Disini penulis melihat bahwa untuk mengidentifikasi landasan pemikiran dibalik gagasan ALBA tidak dapat dipisahkan dengan mengenali bagaimana pemikiran-pemikiran dan Hugo Chavez.

ALBA yang didorong oleh Hugo Chavez sampai saat ini masih merupakan satu gagasan/konsep yang masih mencari bentuk pelebagaan formal/material. Hugo Chavez menganggap bahwa kawasan Amerika Latin saat ini berada dalam penjajahan secara ekonomi-politik oleh negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu Chavez yang sejak masa mudanya terinspirasi oleh perjuangan pahlawan Simon Bolivar menganggap bahwa semangat pembebasan Bolivar menjadi sangat relevan untuk digunakan saat ini. Bolivar menggaungkan perlunya dibentuk suatu Liga Bangsa Bangsa: suatu gabungan negara-negara Republik. Semangat inilah yang dianggap relevan dimana lembaga tersebut dapat menghadapi ancaman politik eksternal.

Neoliberalisme yang menyebabkan oligarki di Amerika Latin melahirkan suatu bentuk pembangunan integrasi berbasis kapitalis sehingga model penggabungan tersebut berdasar pada penggabungan dari atas, dari kalangan elit. Chavez yang tidak sepakat dengan model penggabungan model tersebut menawarkan ALBA sebagai konsep penggabungan dari bawah.

Konsep kerjasama regionalisme yang ingin diterapkan di Amerika Latin, ALBA secara resmi dideklarasikan dan disepakati oleh Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Kuba Fidel Castro di Havana pada tanggal 14 Desember 2004. Dua tahun setelah kesepakatan tersebut Bolivia di bawah Presiden Evo Morales resmi menjadi anggota ALBA.¹¹ ALBA adalah konsep yang didasarkan pada prinsip saling melengkapi (*complementarity*) bukan pada kompetisi (*competition*), pada prinsip solidaritas (*solidarity*) dan bukan pada dominasi (*domination*), pada prinsip kerjasama (*cooperation*) dan bukan pada eksploitasi, dan pada prinsip menghormati kedaulatan bangsa (*sovereignty*) dan bukan pada

¹¹ Michael Fox, op cit

peranan korporasi (*corporate rule*), yang semuanya didasari oleh partisipasi masyarakat.¹¹²

Sebagai langkah awal untuk membangun aliansi tersebut adalah dengan menggabungkan diri pada pergerakan alternatif yang dilaksanakan di kawasan maupun juga diseluruh dunia, pergerakan alternatif tersebut antara lain seperti World Social Forum atau forum-forum sosial kawasan dan negara. Dari penggabungan itu, ide integrasi ALBA akan menjadi semakin kaya dan pada saat yang sama akan tersosialisasi dengan baik sehingga dukungan akan dengan mudah didapatkan. ALBA sebagai satu bentuk regionalisme tidak bisa dilihat sebagai satu bentuk yang telah selesai diterapkan secara penuh tetapi harus dilihat sebagai satu proses yang saat ini sedang berlangsung dan terus mencari penguatan-penguatan disegala aspek.

Sebagai bagian dari action plan dari integrasi ini adalah sebagai misal hubungan antara Venezuela dengan Kolombia. Chavez mengungkapkan:¹¹³

"Venezuela menghasilkan aluminium kualitas tinggi di Guyana dan kami mengekspornya dalam bentuk material mentah ke Eropa dan Amerika Serikat. Dari pihaknya, Kolombia telah membangun pabrik pemrosesan aluminium bawah air yang lebih banyak dari yang kami punya, namun Kolombia membeli aluminiumnya dari Eropa atau negara-negara lainnya. Alangkah baiknya jika Venezuela dan Kolombia membentuk suatu rantai produksi yang akan membuat kedua negara memproduksi aluminium dan turunannya dengan kemampuan bersama untuk dijual ke pasar dunia."

Ide lain dari Chavez adalah membentuk suatu perusahaan Minyak Amerika Selatan -- Petro America -- dimana hal ini sangat memungkinkan jika

¹¹² *Alternative to Corporate Globalization. Venezuela's ALBA.*
<http://www.globalexchange.org/countries/americas/venezuela/VZneoliberalismALBA.pdf>, 17 Mei 2008, 00.23

¹¹³ Marta Harnecker, hal.146-147

dilihat dari kepemilikan minyak negara-negara di kawasan ini. Lima negara yang dibebaskan oleh Bolivar dari penjajahan Spanyol adalah negara-negara yang kaya akan energi: memiliki minyak dan gas.¹¹⁴

Beberapa program-program strategis dari ALBA yang memiliki perbedaan dan sekaligus sebagai alternatif dari neoliberalisme FTAA adalah sebagai berikut:¹¹⁵

a. Pertanian untuk rakyat atau pertanian untuk pasar

Dalam neoliberalisme, sektor pertanian dipandang sebagai penghasil komoditi untuk dipertukarkan. Dalam pandangan ini, bukan hal penting untuk mempertanyakan siapa yang memproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk kepentingan siapa produksi dilakukan. Satu-satunya yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar sektor pertanian bisa memproduksi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pasar.

Kepentingan korporasi transnasional pada sektor pertanian tanpa perantara apa-apa menghantam kepentingan rakyat miskin di kawasan Amerika Latin. Karena di kawasan ini, produksi barang-barang pertanian tidak semata-mata berarti produksi barang dagangan (komoditi). Lebih dari itu, pertanian adalah sebuah cara hidup (*way of life*) mayoritas rakyat. Dalam kurun waktu yang lama, pertanian telah menjadi fonasi bagi perlindungan budaya, sebetuk pengausan teritori (wilayah) yang mendefinisikan hubungan manusia dengan alam dan yang secara langsung berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan pangan.

Dengan kenyataan ini, sektor pertanian tidak bisa diperlakukan sama seperti jenis-jenis aktivitas atau produk ekonomi lainnya. Peran strategis pertanian yang demikian itu kemudian dikukuhkan dalam Konstitusi 1999. Dalam pasal 305 Konstitusi 1999 disebutkan:

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Coen Husain Pontoh, *op cit*, hal.109

"negara harus mempromosikan pertanian berkelanjutan sebagai strategi dasar untuk integrasi pembangunan pedesaan dan konsekuensinya menjamin keamanan pangan rakyat; ini harus dipahami sebagai kecukupan nasional dan ketersediaan pangan yang stabil dan menguntungkan serta akses yang permanen. Keamanan pangan harus dicapai melalui pengembangan dan pengistimewaan produksi pertanian domestik, yang semula merupakan aktivitas pertanian, peternakan atau perikanan. Produksi pangan merupakan kepentingan nasional yang mendasar untuk pembangunan ekonomi dan sosial sebuah bangsa. Dengan demikian, negara harus membantu pembiayaan, perdagangan, transfer teknologi, kepemilikan lahan, infrastruktur, kualifikasi tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mencapai level strategis kemandirian pangan"

Dalam proposal ALBA, pemerintah wajib menyediakan subsidi dan perlindungan penuh terhadap sektor pertanian. Menurut pandangan ini, liberalisasi pasar produk pertanian dalam situasi dimana berlangsung kelimpangan struktural dan kesenjangan informasi yang dialami oleh kawasan hanya akan berakibat pada kehancuran pasar domestik. Dalam struktur ekonomi yang timpang, persaingan bebas akan menghancurkan pertanian domestik yang dalam hal ini adalah petani kecil dan menengah. Kebijakan penghapusan tarif, juga tidak memperkuat struktur pertanian domestik karena kebijakan tersebut lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan transnasional yang monopolistik.

- b. Hak milik intelektual atau hak rakyat pada pengobatan dan untuk kualitas pangan yang baik.

Jika dalam perdagangan barang rezim FTAA menuntut liberalisasi pasar nasional, sebaliknya dalam perdagangan jasa mereka mendesakkan perlindungan pasar. Salah satu produk jasa yang harus dilindungi adalah hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Tuntutan ini dikukuhkan secara

legal dalam badan perdagangan dunia WTO dan harus diterapkan oleh semua negara anggotanya.

Dengan berlakunya rezim paten ini, penduduk di negara-negara berkembang tidak bebas memproduksi atau memperoleh metode-metode pengobatan berkualitas dan murah. Mereka juga harus berhati-hati mengembangkan bibit pangan yang organik. Dengan rezim paten, negara-negara berkembang bisa dipaksa agar membayar sangat mahal untuk sesuatu keperluan yang penting bagi kesejahteraan rakyatnya.

Dalam perspektif ALBA, motif utama di balik kosakata "perlindungan hak milik intelektual" adalah kepentingan ekonomi perusahaan-perusahaan transnasional. Saat ini 80% paten di bidang modifikasi pangan genetik dikuasai oleh 13 perusahaan transnasional. Lima besar perusahaan agro-chemical mengontrol hampir seluruh pasar benih dunia.

Dengan kenyataan ini, ALBA mempropagandakan perlawanan terhadap rezim paten. Hak milik intelektual harus diletakkan dalam kerangka produk budaya, sebuah kerja bersama berkelanjutan dari seluruh pengetahuan manusia. Oleh karena itu, karya intelektual tidak boleh dimonopoli untuk kepentingan akumulasi kapital dari perusahaan transnasional. Berbeda dengan kinerja pasar bebas, ALBA mempromosikan proteksi pasar nasional dari barang-barang impor, tetapi pada saat yang sama menuntul akses sebesar-besarnya dan seluas-luasnya terhadap hak milik intelektual.

c. Menolak liberalisasi, deregulasi dan privatisasi pelayanan publik.

Pemerintahan Chavez dengan tegas menentang liberalisasi, deregulasi dan privatisasi. Kebijakan-kebijakan ini dianggap mebatasi peran negara untuk mendesain dan memutuskan kebijakan yang memblak hak-hak rakyat untuk memperoleh akses terhadap perlunya pelayanan berkualitas dengan harga terjangkau.

Dalam pandangan Chavez, pelayanan publik merupakan kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, bukan diperdagangkan untuk mencapai keuntungan.

Keuntungan, karenanya, tidak bisa selalu diukur berdasar harga, tapi oleh kepentingan sosial. Konsekuensinya, ketersediaan pelayanan publik harus ditentukan berdasarkan kebutuhan sosial-individual, bukan oleh kemampuan rakyat untuk membayar. Dari sudut pandang ini, rakyat tidak membutuhkan privatisasi pelayanan publik. Rezim Bolivarian ini tidak akan pernah menerima pertimbangan yang implikasinya akan membuka seluruh pelayanan publik terhadap kompetisi asing dan menolak penghapusan instrumen-instrumen kebijakan publik seperti tarif, subsidi atau solidaritas publik dan tanggung jawab untuk meregulasi harga serta jaminan akses yang besar bagi mayoritas terhadap pelayanan-pelayanan yang esensial.

- d. Dana pengganti untuk mengoreksi ketimpangan dalam ALBA
- Negara-negara di kawasan Amerika Latin sesungguhnya memiliki kesenjangan struktural satu sama lain. Di kawasan itu, ada negara-negara kaya seperti Venezuela, Argentina atau Brazil. Tapi ada juga negara-negara miskin seperti Bolivia dan Haiti. Dalam konteks kesenjangan struktural itu, rezim Bolivarian mengusulkan agar ALBA membentuk sebuah lembaga dana kemitraan yang dikenal dengan *Compensatory Funds of Structural Convergence*. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam level pembangunan negara-negara dan sektor-sektor produktif, menentukan mekanisme yang tepat bagi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial, mendefinisikan pengertian-pengertian pembangunan secara jelas dan menentukan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya.

Hugo Chavez membentuk sebuah lembaga yang disebut *Compensatory Fund for Structural Convergence* yaitu satu Lembaga keuangan yang merupakan bagian dari kerjasama ALBA yang memiliki fungsi dan tugas yang sama dengan Bank Dunia ketika pertama kali didirikan pasca Perang Dunia II yaitu mengelola dan mendistribusikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang ekonominya rentan oleh krisis. Dengan *Compensatory Funds* ini, negara-negara

miskin dikawasan Amerika Latin dibantu untuk mengurangi risiko kerugian hingga ke tingkat yang tidak membahayakan ekonomi nasionalnya.

Melalui program Compensatory Funds, Venezuela menjadi Negara donor baru di Amerika Latin, menggantikan keberadaan IMF. Akibatnya, dilaporkan bantuan IMF di kawasan itu jatuh sebesar 50 juta dollar AS, atau kurang dari satu persen portfolio global, dibandingkan dengan 80 persen pada tahun 2005. Venezuela kini memiliki cadangan dana sebesar 34 milyar dollar AS. Pemerintahan Chavez juga mengontrol 18 milyar dollar AS dana kontan yang ditransfer dari Bank Sentral dan perusahaan minyak Negara Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Bantuan yang dinamakan Solidaritas Bolivarian ini tidak disertai dengan persyaratan apapun yang harus dijalankan oleh Negara penerima bantuan.¹¹⁶

Untuk melembagakan program Solidaritas Bolivarian ini, Chavez mengusulkan agar dibentuk *Banco del Sur* atau Bank Selatan. Menurut Chavez, dalam pidatonya di hadapan ribuan pendukungnya di Bueonos Aires, Argentina, pendirian Banco del Sur ini dimaksudkan untuk menghentikan lingkaran setan kemiskinan dan utang luar negeri. Rencana pendirian Banco del Sur ini disusul dengan usulan agar dibentuk mata uang bersama Amerika Latin, sebagai alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan internasional yang dikontrol oleh AS, dengan dominasi mata uang dollar.¹¹⁷

Pada tanggal 23 April 2008 pertemuan antara negara-negara anggota ALBA yaitu Venezuela, Kuba, Bolivia, Nikaragua dan Dominika. Pertemuan yang digagas oleh Presiden Hugo Chavez tersebut membicarakan tentang dampak kenaikan harga bahan makanan di kawasan dan menyepakati untuk melakukan

¹¹⁶ Syamsul Hadi, *Menyimak "Gerakan Independensi" Amerika Latin terhadap AS dan Neoliberalisme Global*, Makalah, disampaikan dalam diskusi "Kebijakan Ekonomi Amerika Latin Melawan IMF dan Bank Dunia", di Koalisi Anti Utang 25 Mei 2007

¹¹⁷ *ibid*

satu kerjasama mengatasi masalah kenaikan harga pangan tersebut. Seperti yang dilaporkan bahwa bahwa Presiden Nikaragua Daniel Ortega, Presiden Bolivia Evo Morales, Wakil Presiden Kuba Carlos Lage dan Hugo Chavez menandatangani sejumlah kesepakatan melaksanakan satu kerjasama pembangunan pertanian, menciptakan satu jaringan distribusi pangan dan mengadakan \$100 juta sebagai pendanaan ALBA untuk pangan.¹¹⁸

Kesepakatan yang ditandatangani tersebut memberikan fokus pada beras, jagung, minyak untuk konsumsi, kacang-kacangan, daging sapi dan susu, dan pengembangan sistem perairan. Untuk menghindari spekulasi harga oleh pihak swasta, para kepala negara sepakat untuk menciptakan jaringan distribusi pangan untuk publik dengan pengaturan harga. Reuters melaporkan pada tanggal 26 April bahwa Menteri Pertanian dari Amerika Tengah, Kuba, Haiti, Republik Dominika dan Venezuela mengadakan pembicaraan di ibukota Nikaragua tentang satu upaya peningkatan produksi jagung, beras dan kacang-kacangan begitu juga peningkatan dalam hasil-hasil peternakan.¹¹⁹

¹¹⁸ Trent Hawkins, *ALBA Summit Tackles Food Summit* 3 May 2008
<http://www.greenleft.org.au/2008/749/38721> 3 Juni 2008, 18.38

¹¹⁹ *ibid*